



STRATEGI KEBIJAKAN PENYALURAN ZIS PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI BENGKULU

PRODUCTIVE ZIS DISTRIBUTION POLICY STRATEGY FOR EMPOWERING MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN BENGKULU PROVINCE

Naskah disubmit: 27 Februari 2025 | 14 Maret 2025 | diterima: 4 April 2025

Desrizaldi*

Kantor Wilayah Ke-
menterian Agama
Provinsi Bengkulu

*Penulis Korespondensi:
perencanaan.bkl@gmail.com

Abstrak

Policy paper ini menguraikan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, namun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal dan kapasitas manajemen. Di sisi lain, potensi pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Bengkulu juga cukup besar. Oleh karena itu, penyaluran ZIS produktif dapat menjadi solusi strategis untuk memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan penyaluran ZIS produktif untuk pemberdayaan UMKM di Provinsi Bengkulu, merumuskan strategi kebijakan yang efektif, dan memberikan rekomendasi implementasi kebijakan. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, termasuk pengelola lembaga ZIS, pelaku UMKM, perwakilan pemerintah daerah, dan para ahli di bidang ekonomi syariah untuk menggali informasi mengenai potensi dan tantangan penyaluran ZIS produktif, kebutuhan UMKM, serta persepsi dan harapan terkait strategi kebijakan yang efektif. Hasilnya menunjukkan bahwa potensi pengumpulan dan penyaluran dana ZIS di Bengkulu belum dimanfaatkan secara optimal. Penyaluran dana ZIS masih didominasi oleh kegiatan konsumtif, padahal penyaluran ZIS produktif dapat memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi UMKM. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan penyaluran ZIS produktif, termasuk model penyaluran, mekanisme pengawasan, dan sinergi dengan program pemerintah daerah serta lembaga keuangan lainnya. Artikel ini merekomendasikan beberapa strategi kebijakan, antara lain: peningkatan pengumpulan dana ZIS melalui sosialisasi dan edukasi; penyaluran dana ZIS yang tepat sasaran berdasarkan kebutuhan UMKM; pendampingan dan pelatihan bagi UMKM yang menerima dana ZIS; pengawasan dan evaluasi program penyaluran ZIS secara berkala; serta sinergi antara lembaga ZIS, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan lainnya.

Kata Kunci: Ekonomi; Kebijakan; Modal Usaha; Pemberdayaan; Produktif; UMKM; ZIS

Abstract

*This policy paper explains that Bengkulu Province has great potential in developing Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM), but still faces various challenges, such as limited capital and management capacity. On the other hand, the potential for collecting Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) funds in Bengkulu is also quite large. Therefore, the distribution of productive ZIS can be a strategic solution to empower UMKM and encourage regional economic growth. This article aims to analyze the potential and challenges of distributing productive ZIS for empowering UMKM in Bengkulu Province, formulate effective policy strategies, and provide recommendations for policy implementation. This paper uses a qualitative method with a descriptive analysis approach and SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Data were obtained through in-depth interviews with stakeholders, including ZIS institution managers, UMKM actors, local government representatives, and experts in the field of sharia economics to explore information on the potential and challenges of distributing productive ZIS, UMKM needs, and perceptions and expectations related to effective policy strategies. The results show that the potential for collecting and distributing ZIS funds in Bengkulu has not been optimally utilized. The distribution of ZIS funds is still dominated by consumptive activities, whereas the distribution of productive ZIS can provide a greater and more sustainable impact on UMKM. Therefore, an effective policy strategy is needed to increase the distribution of productive ZIS, including distribution models, monitoring mechanisms, and synergy with local government programs and other financial institutions. This article recommends several policy strategies, including: increasing the collection of ZIS funds through socialization and education; distribution of ZIS funds that are right on target based on the needs of UMKM; mentoring and training for UMKM receiving ZIS funds; periodic supervision and evaluation of ZIS distribution programs; and synergy between ZIS institutions, local governments, and other financial institutions.*

Keywords: Economy; Policy; Business Capital; Empowerment; Productive; UMKM; ZIS

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu. UMKM berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, UMKM di Bengkulu masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan mereka.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan modal. Banyak UMKM yang kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena berbagai alasan, seperti persyaratan yang ketat, kurangnya agunan, atau informasi keuangan yang tidak memadai. Keterbatasan modal ini menghambat UMKM untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan produksi, dan memperluas pasar (Indraswanti & Sunoto, 2024).

Selain keterbatasan modal, UMKM di Bengkulu juga menghadapi tantangan dalam hal kapasitas manajemen. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha mereka, seperti manajemen keuangan, pemasaran, atau produksi. Kurangnya kapasitas manajemen ini dapat menyebabkan UMKM tidak efisien, kurang inovatif, dan sulit bersaing di pasar (Widodo dkk., 2024).

Di sisi lain, Provinsi Bengkulu memiliki potensi besar dalam pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). ZIS merupakan instrumen keuangan syariah yang memiliki potensi besar untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, termasuk UMKM. Dana ZIS yang terkumpul dapat disalurkan kepada UMKM yang membu-

tuhkan modal, pelatihan, atau pendampingan untuk mengembangkan usaha mereka (BAZNAS Bengkulu, 2023). Namun, potensi pengumpulan dan penyaluran dana ZIS di Bengkulu belum dimanfaatkan secara optimal. Pengumpulan dana ZIS masih rendah dibandingkan dengan potensi yang ada, dan penyaluran dana ZIS masih didominasi oleh kegiatan konsumtif, seperti bantuan sembako atau santunan. Padahal, penyaluran ZIS produktif, seperti modal usaha atau pelatihan, dapat memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi UMKM (Utama & Bahri, 2021).

Penyaluran ZIS produktif untuk UMKM dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi tantangan keterbatasan modal dan kapasitas manajemen yang dihadapi UMKM di Bengkulu. Dengan mendapatkan modal usaha dari dana ZIS, UMKM dapat meningkatkan produksi, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, UMKM juga dapat mengikuti pelatihan dan pendampingan yang didanai oleh ZIS untuk meningkatkan kapasitas manajemen mereka.

Salah satu lembaga yang dapat mendukung aksi dalam memberdayakan perekonomian negara dan UMKM adalah lembaga zakat. Zakat yang diberikan dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian jika dikembangkan pada sektor-sektor produktif. Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat di Indonesia dapat dikatakan mempunyai kemajuan karena berbentuk kelembagaan. Terdapat 2 lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) (Ahmadi, 2021). Zakat juga unik karena dalam strateginya tidak hanya menghubungkan subjek (*muzakki*) dan objek (*mustahik*), tetapi juga dengan lembaga (amil zakat)

yang memfokuskan kegiatannya pada pengumpulan dan penyaluran zakat kepada yang berhak (Lubis & Latifah, 2019).

Untuk mengoptimalkan penyaluran ZIS produktif bagi UMKM di Bengkulu, diperlukan strategi kebijakan yang efektif. Strategi kebijakan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan pengumpulan dana ZIS, penyaluran dana ZIS yang tepat sasaran, hingga pengawasan dan evaluasi program penyaluran ZIS (Putriana dkk., 2023).

Begitu strateginya posisi ZIS produktif untuk memberdayakan ekonomi umat melalui UMKM, namun Kementerian Agama sebagai lembaga negara yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengatur penyaluran ZIS produktif belum mengatur secara khusus hal tersebut. Peran Kemenag lebih terfokus pada regulasi dan pengawasan pengelolaan ZIS secara umum, serta mendorong sinergi antara lembaga ZIS dengan berbagai pihak. Kehadiran regulasi khusus penyaluran ZIS produktif melalui pemberdayaan UMKM merupakan upaya nyata mendorong sebuah gerakan kebangkitan ekonomi umat, khususnya kaum dhuafa dari *musakki* (penerima zakat) menjadi *mustahik* (pemberi zakat) melalui unit-unit usaha produktif (*entrepreneurship*).

Kementerian Agama memiliki peran dalam mengatur pengelolaan ZIS melalui peraturan dan pedoman. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana ZIS dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan dana ZIS dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk pemberdayaan UMKM.

Kementerian Agama memiliki program-program pemberdayaan ekonomi umat

yang dapat bersinergi dengan pemanfaatan ZIS. Program-program ini meliputi pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan akses pembiayaan. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Agama mendorong koordinasi antara lembaga ZIS dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat. Koordinasi ini penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan UMKM melalui ZIS.

Kementerian Agama berperan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai ZIS kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ZIS dan mendorong partisipasi dalam pengumpulan dan penyaluran ZIS. Dengan meningkatnya pengumpulan ZIS, diharapkan dana yang tersedia untuk pemberdayaan UMKM juga akan meningkat.

Selain itu, sinergi antara lembaga ZIS, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan lainnya juga penting untuk mendukung keberhasilan penyaluran ZIS produktif. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan kebijakan dan regulasi yang kondusif, sementara lembaga keuangan dapat berperan dalam menyediakan akses pembiayaan tambahan bagi UMKM yang telah menerima manfaat dari dana ZIS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran ZIS produktif memiliki dampak positif terhadap perkembangan UMKM. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Laila Rohmawati dan Masruchin di Sidoarjo bahwa penyaluran ZIS melalui lembaga Lazismu menawarkan berbagai program yang beberapa di antaranya bertujuan un-

tuk memberdayakan UMKM di Indonesia dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dimulai dari pemberian modal, penyediaan *startup tools*, dan lain sebagainya untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UMKM). Karena di bidang kewirausahaan merupakan salah satu cara untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan di sinilah berlangsungnya siklus perekonomian mulai dari produksi, konsumsi dan distribusi. Selain itu, uang mengalir melalui banyak penjual dan pembeli yang berbeda. Berdasarkan status zakat dalam kerangka zakat Islam, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pendistribusian zakat meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, serta mengetahui perspektif *maqashid syariah* dalam pendistribusiannya (Rohmawati & Masruchin, 2024). Namun, strategi kebijakan penyaluran ZIS produktif untuk pemberdayaan UMKM di Provinsi Bengkulu masih terbatas. Dengan demikian, kajian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam mengenai strategi kebijakan bagi Kementerian Agama yang efektif untuk meningkatkan penyaluran ZIS produktif bagi UMKM di Bengkulu sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan umat.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalahnya sebagai berikut:

1. Potensi pengumpulan ZIS di Provinsi Bengkulu belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya realisasi pengumpulan ZIS dibandingkan dengan potensi yang seharusnya. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya

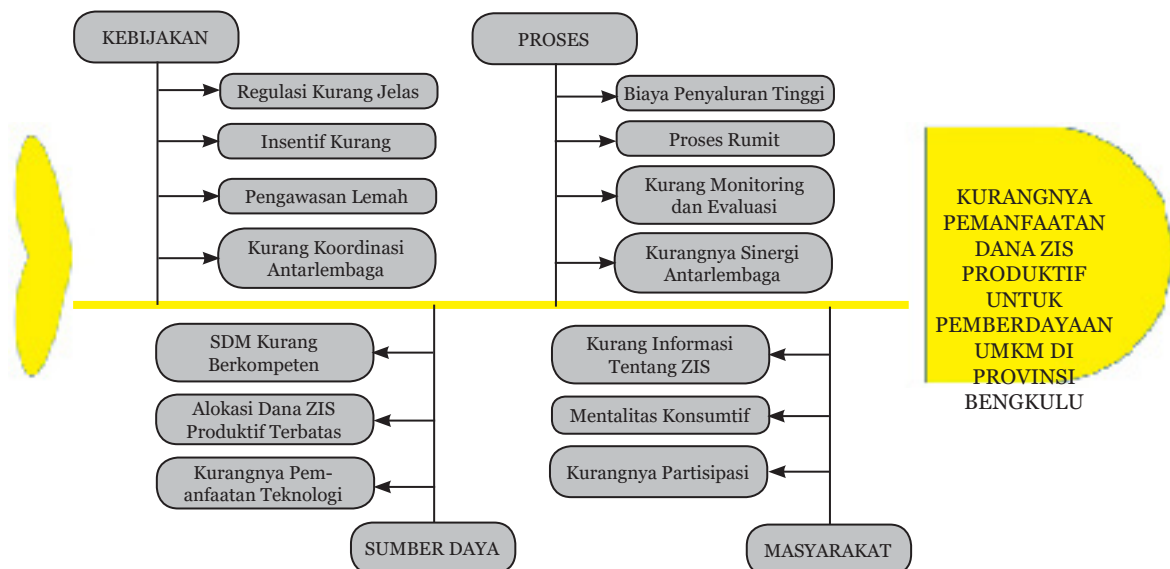
informasi tentang ZIS, dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola ZIS diduga menjadi penyebab belum optimalnya pengumpulan ZIS.

2. Penyaluran dana ZIS di Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh kegiatan konsumtif, seperti pemberian bantuan sembako atau santunan. Padahal, penyaluran ZIS produktif, seperti modal usaha, pelatihan, atau pendampingan, memiliki potensi lebih besar untuk memberdayakan UMKM secara berkelanjutan.
3. UMKM di Provinsi Bengkulu masih menghadapi masalah keterbatasan modal dan akses pembiayaan. Banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal karena persyaratan yang ketat atau kurangnya agunan.
4. Kapasitas manajemen UMKM di Provinsi Bengkulu masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha mereka, seperti manajemen keuangan, pemasaran, atau produksi.
5. Kurangnya koordinasi dan sinergi antarlembaga terkait, seperti lembaga pengelola ZIS, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan, diduga menghambat efektivitas penyaluran ZIS produktif.
6. Belum ada strategi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatur dan mengoptimalkan penyaluran ZIS produktif bagi UMKM di Provinsi Bengkulu.
7. Kurangnya data dan informasi. Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan relevan mengenai UMKM dan potensi ZIS di Provinsi Bengkulu masih

terbatas. Hal ini menyulitkan dalam perencanaan dan evaluasi program penyaluran ZIS produktif.

8. Perlunya model pemberdayaan UMKM yang efektif dan sesuai dengan karakteristik UMKM di Provinsi Bengkulu. Model ini harus mencakup aspek pendampingan, pelatihan, dan akses pembiayaan.
9. Pengawasan dan evaluasi terhadap program penyaluran ZIS produktif belum dilakukan secara optimal. Hal ini menyebabkan sulitnya mengukur dampak program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
10. Peran serta masyarakat dalam mendukung program penyaluran ZIS produktif masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya ZIS produktif bagi pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat diuraikan akar masalahnya yang menjadi faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya penyaluran ZIS produktif untuk pemberdayaan UMKM di Provinsi Bengkulu dalam bentuk *Diagram Fishbone* berikut ini.



Gambar 1. Akar Masalah

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah di atas dapat dianalisis dengan menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) bahwa penyaluran ZIS produktif untuk pemberdayaan UMKM di Provinsi Bengkulu memiliki tingkat urgensi, keseriusan, dan pertumbuhan yang tinggi, maka yang menjadi *problem statement* dalam makalah kebijakan ini bahwa dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) produktif di Provinsi Bengkulu cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pemberdayaan UMKM.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan Penulisan

Penulisan artikel kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan UMKM di Provinsi Bengkulu melalui penyaluran ZIS produktif.

Manfaat Penulisan

Secara spesifik, artikel ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat: *Pertama*, memberikan pemahaman yang mendalam mengenai potensi dan tantangan penyalur-

an ZIS produktif bagi UMKM di Bengkulu, sehingga para pemangku kepentingan memiliki informasi yang akurat dan komprehensif untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Kedua, menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan yang efektif dan aplikatif untuk meningkatkan penyaluran ZIS produktif, yang dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah, lembaga ZIS, dan pihak terkait dalam upaya memberdayakan UMKM.

Ketiga, mendorong sinergi dan koordinasi antarlembaga terkait dalam pengelolaan dan penyaluran ZIS produktif, sehingga program-program pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku UMKM mengenai manfaat ZIS produktif, sehingga partisipasi dalam program-program ZIS dapat meningkat dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian, artikel kebijakan ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi para pengambil keputusan, praktisi, dan akademisi yang tertarik dengan isu pemberdayaan UMKM melalui ZIS, serta berkontribusi pada perumusan kebijakan publik yang lebih baik di Provinsi Bengkulu.

Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka Teori

Beberapa teori yang relevan dan dapat digunakan sebagai landasan dalam kajian ini antara lain:

1. Teori Pemberdayaan: Teori ini menekankan pada proses peningkatan kapasitas dan kemandirian individu atau kelompok masyarakat, dalam hal ini UMKM, untuk mengambil kontrol atas

kehidupan mereka sendiri. Penyaluran ZIS produktif dapat dilihat sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi, di mana UMKM diberikan akses terhadap sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.

2. Teori Ekonomi Syariah: Teori ini didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. ZIS sebagai salah satu instrumen ekonomi syariah memiliki peran penting dalam redistribusi pendapatan dan pemberdayaan ekonomi umat.
3. Teori Kelembagaan: Teori ini membahas tentang peran dan pengaruh kelembagaan dalam mempengaruhi perilaku ekonomi. Dalam konteks ini, lembaga ZIS, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mendukung penyaluran ZIS produktif dan pemberdayaan UMKM.
4. Teori Pembangunan Berkelanjutan: Teori ini menekankan pada pentingnya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Penyaluran ZIS produktif dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memberdayakan UMKM yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam kajian ini menggambarkan hubungan antara berbagai konsep yang terkait dengan penyaluran ZIS produktif dan pemberdayaan UMKM. Beberapa konsep kunci yang perlu dijelaskan antara lain:

1. ZIS produktif: ZIS yang disalurkan untuk kegiatan produktif, seperti modal usaha, pelatihan, atau pendampingan, yang memberikan manfaat jangka panjang bagi UMKM.
2. Pemberdayaan UMKM: Proses peningkatan kapasitas dan kemandirian UMKM untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja.
3. Strategi kebijakan: Rangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini meningkatkan penyaluran ZIS produktif bagi UMKM.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi: Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penyaluran ZIS produktif dan pemberdayaan UMKM, seperti kebijakan, kelembagaan, sosial budaya, infrastruktur, dan kapa-sitas UMKM.

Berdasarkan kerangka konseptual ini menggambarkan bahwa potensi ZIS yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk ZIS produktif untuk memberdayakan UMKM. Efektivitas penyaluran ZIS produktif dan pemberdayaan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan, kelembagaan, sosial budaya, dan infrastruktur.

METODOLOGI

Metode penulisan artikel kebijakan ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

Data akan dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pengelola lembaga ZIS, pelaku UMKM, perwakilan pemerintah daerah, dan para ahli

di bidang ekonomi syariah. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai potensi dan tantangan penyaluran ZIS produktif, kebutuhan UMKM, serta persepsi dan harapan terkait strategi kebijakan yang efektif.

Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang rinci dan komprehensif mengenai kondisi dan permasalahan yang ada. Selanjutnya, analisis SWOT akan digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait penyaluran ZIS produktif. Analisis ini akan membantu dalam merumuskan strategi kebijakan yang tepat dan efektif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa potensi pengumpulan ZIS di Provinsi Bengkulu cukup besar, namun belum termanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat mengenai ZIS produktif, preferensi masyarakat terhadap penyaluran ZIS konsumtif, dan kurangnya informasi mengenai program-program ZIS produktif yang tersedia. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas SDM lembaga ZIS dalam mengelola dan menyalurkan ZIS produktif, serta kurangnya koordinasi antarlembaga terkait.

Berdasarkan analisis SWOT, beberapa strategi kebijakan yang direkomendasikan untuk meningkatkan penyaluran ZIS produktif antara lain: (1) Peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai ZIS produktif kepada masyarakat dan pelaku UMKM; (2) Pengembangan model penyaluran ZIS produktif yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti pemberian modal usaha,

pelatihan, atau pendampingan; (3) Peningkatan kapasitas SDM lembaga ZIS melalui pelatihan dan pendampingan; (4) Peningkatan koordinasi dan sinergi antarlembaga terkait, seperti lembaga ZIS, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan; (5) Pengembangan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan dan penyaluran ZIS produktif.

Untuk implementasi kebijakan yang efektif, diperlukan beberapa langkah, antara lain: (1) Pembentukan tim atau kelompok kerja yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk merumuskan dan melaksanakan program-program ZIS produktif; (2) Penyusunan rencana aksi yang jelas dan terukur, termasuk target, indikator kinerja, dan alokasi anggaran; (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang diharapkan; (4) Peningkatan peran serta masyarakat dan pelaku UMKM dalam program-program ZIS produktif. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang kondusif, serta sinergi dengan lembaga keuangan untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM.

Kajian ini mengidentifikasi beberapa model penyaluran ZIS produktif yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM di Bengkulu. Model-model tersebut antara lain: (1) Pemberian modal usaha tanpa bunga atau dengan margin yang sangat rendah, yang disesuaikan dengan jenis usaha dan skala UMKM; (2) Pelatihan dan pendampingan manajemen usaha, pemasaran, dan produksi, yang diselenggarakan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan UMKM; (3) Pemberian bantuan peralatan atau teknologi yang dibutuhkan UMKM un-

tuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha; (4) Pengembangan *platform* digital yang menghubungkan UMKM dengan pasar dan sumber daya lainnya, seperti modal, pelatihan, atau pendampingan.

Selain itu, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan program-program ZIS produktif. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui donasi ZIS, menjadi relawan pendamping UMKM, atau membeli produk-produk UMKM. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan UMKM, antara lain melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta sinergi dengan lembaga ZIS dan pihak terkait lainnya.

Penguatan kapasitas kelembagaan ZIS merupakan kunci keberhasilan penyaluran ZIS produktif. Hal ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola kelembagaan, dan pengembangan sistem informasi manajemen yang modern. Pelatihan dan pendampingan bagi pengelola ZIS perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola keuangan, melakukan analisis kelayakan usaha, dan memberikan pendampingan kepada UMKM. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS juga perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Sinergi dan kemitraan antara lembaga ZIS, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pihak swasta merupakan faktor penting dalam mendukung keberlanjutan program ZIS produktif. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan melalui kebijakan yang kondusif, fasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaan, dan penyediaan infrastruktur

tur pendukung. Lembaga keuangan dapat berperan dalam memberikan akses pembiayaan tambahan bagi UMKM yang telah menerima manfaat dari dana ZIS. Kemitraan dengan pihak swasta dapat dilakukan dalam bentuk program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang berorientasi pada pemberdayaan UMKM.

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari pengelolaan program ZIS produktif. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengukur dampak program terhadap perkembangan UMKM dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan program di masa mendatang. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat dipublikasikan secara transparan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan UMKM adalah literasi keuangan dan manajemen yang baik. Oleh karena itu, program-program pelatihan dan pendampingan yang berkaitan dengan literasi keuangan dan manajemen UMKM perlu ditingkatkan. Pelaku UMKM perlu memahami bagaimana mengelola keuangan usaha secara efektif, membuat laporan keuangan yang akurat, serta memahami prinsip-prinsip manajemen yang baik. Dengan literasi keuangan dan manajemen yang baik, UMKM akan lebih mampu mengembangkan usaha mereka dan memanfaatkan dana ZIS produktif secara optimal.

Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran ZIS

produktif. Penggunaan aplikasi atau *platform* digital dapat mempermudah proses pengumpulan ZIS, penyaluran dana, serta monitoring dan evaluasi program. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memperluas jangkauan program ZIS produktif, misalnya melalui *platform e-commerce* yang memfasilitasi UMKM untuk menjual produk mereka secara *online*.

Keberlanjutan program penyaluran ZIS produktif perlu dijamin agar dapat memberikan dampak jangka panjang bagi pemberdayaan UMKM. Untuk itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga ZIS, dan masyarakat. Selain itu, program juga perlu dirancang secara berkelanjutan, misalnya dengan memberikan pendampingan dan pelatihan secara berkala kepada UMKM, serta memfasilitasi akses mereka terhadap pasar dan sumber daya lainnya.

Evaluasi dampak program penyaluran ZIS produktif perlu dilakukan secara komprehensif untuk mengukur efektivitas program dalam memberdayakan UMKM. Evaluasi ini tidak hanya mengukur peningkatan pendapatan atau aset UMKM, tetapi juga dampak lainnya, seperti peningkatan kapasitas manajemen, akses pasar, dan kesejahteraan keluarga. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku UMKM, pengelola ZIS, dan pakar independen.

Keberlanjutan pendanaan program ZIS produktif perlu dijamin agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain mendapatkan donasi dari masyarakat, pendanaan juga dapat diupayakan dari sumber-sumber lain, seperti kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, atau pihak

swasta. Pengembangan model pendanaan yang inovatif, seperti *crowdfunding* atau sukuk, juga perlu dipertimbangkan.

Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai ZIS produktif merupakan kunci penting dalam meningkatkan pengumpulan dan penyaluran ZIS. Sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan secara terus-menerus melalui berbagai saluran, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas. Selain itu, perlu diberikan contoh-contoh keberhasilan penyaluran ZIS produktif agar masyarakat lebih termotivasi untuk berpartisipasi.

Pengembangan jaringan dan kemitraan antara UMKM, lembaga ZIS, dan pihak terkait lainnya perlu terus ditingkatkan. Jaringan ini dapat memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan akses terhadap pasar, modal, teknologi, dan sumber daya lainnya. Kemitraan dengan pihak swasta dapat dilakukan dalam bentuk program CSR yang berorientasi pada pemberdayaan UMKM.

Pengembangan produk dan layanan UMKM yang inovatif dan berdaya saing merupakan salah satu kunci keberhasilan UMKM. Program ZIS produktif dapat mendukung UMKM dalam mengembangkan produk baru, meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, serta memberikan pelatihan dan pendampingan dalam hal pemasaran dan branding. Selain itu, UMKM juga perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usaha mereka, seperti melalui *e-commerce* atau media sosial.

Akses pasar dan jaringan merupakan faktor penting bagi keberlangsungan UMKM. Program ZIS produktif dapat membantu UMKM dalam memperluas akses pasar mereka, baik pasar lokal maupun pasar nasional, bahkan internasional. Hal ini dapat

dilakukan melalui berbagai cara, seperti pameran, promosi, kerja sama dengan distributor atau *retailer*, serta memanfaatkan *platform* digital. Selain itu, UMKM juga perlu didorong untuk membangun jaringan dan kemitraan dengan sesama pelaku UMKM, maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait, seperti pemerintah, lembaga keuangan, atau investor.

Peningkatan daya saing UMKM merupakan tujuan utama dari program ZIS produktif. Daya saing UMKM dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, seperti peningkatan kualitas produk, efisiensi produksi, inovasi, serta peningkatan kapasitas manajemen. Selain itu, UMKM juga perlu didorong untuk memiliki sertifikasi atau standar kualitas yang relevan, agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Program ZIS produktif dapat memberikan dukungan dalam hal sertifikasi atau standarisasi produk, serta membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi produksi melalui penggunaan teknologi atau peralatan yang lebih modern.

Program ZIS produktif perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan UMKM. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan model-model penyaluran yang baru, memanfaatkan teknologi digital, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Selain itu, program juga perlu dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan hasil evaluasi. Inovasi dan adaptasi yang berkelanjutan akan memastikan program tetap relevan dan efektif dalam memberdayakan UMKM.

Penguatan kapasitas UMKM tidak hanya terbatas pada aspek finansial dan manajerial, tetapi juga aspek produksi, pemasaran, dan kelembagaan. Program ZIS produktif dapat memberikan dukungan dalam berba-

gai aspek tersebut, seperti pelatihan keterampilan produksi, bantuan dalam pemasaran produk, serta pendampingan dalam pengembangan kelembagaan UMKM. Dengan kapasitas yang kuat, UMKM akan lebih mampu bersaing di pasar dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Keberhasilan program ZIS produktif juga sangat bergantung pada dukungan ekosistem yang kondusif. Ekosistem ini meliputi kebijakan dan regulasi yang mendukung, infrastruktur yang memadai, akses terhadap pembiayaan, serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait perlu bersinergi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dengan dukungan ekosistem yang kuat, program ZIS produktif akan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi pemberdayaan UMKM.

Pengembangan kelembagaan UMKM yang kuat dan berdaya saing merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan UMKM. Program ZIS produktif dapat mendukung UMKM dalam mengembangkan kelembagaan mereka, seperti koperasi atau kelompok usaha bersama. Kelembagaan yang kuat akan memudahkan UMKM dalam mengakses modal, pasar, teknologi, serta sumber daya lainnya. Selain itu, kelembagaan juga dapat menjadi wadah bagi UMKM untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat posisi tawar mereka di pasar.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) UMKM merupakan investasi penting dalam pengembangan UMKM. Program ZIS produktif dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan

bagi pelaku UMKM, baik dalam aspek teknis maupun manajerial. Pelatihan teknis dapat meningkatkan keterampilan produksi dan inovasi produk, sementara pelatihan manajerial dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Dengan SDM yang berkualitas, UMKM akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.

Beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi kebijakan penyaluran ZIS produktif antara lain: (1) Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM mengenai ZIS produktif; (2) Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran; (3) Kurangnya koordinasi antarlembaga terkait; (4) Belum optimalnya sistem informasi dan teknologi. Namun, terdapat juga peluang besar yang dapat dimanfaatkan, antara lain: (1) Potensi ZIS yang besar di Bengkulu; (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ZIS; (3) Perkembangan teknologi yang dapat mendukung pengelolaan dan penyaluran ZIS.

Kajian ini juga menyajikan beberapa studi kasus keberhasilan penyaluran ZIS produktif di daerah lain, yang dapat menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi pengembangan program serupa di Bengkulu. Studi kasus tersebut menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, penyaluran ZIS produktif dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyaluran ZIS produktif memiliki potensi besar untuk memberdayakan UMKM di Provinsi Beng-

kulu. Namun, diperlukan strategi kebijakan yang efektif dan implementasi yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa rekomendasi kebijakan yang diajukan antara lain: (1) Peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai ZIS produktif; (2) Pengembangan model penyaluran ZIS produktif yang sesuai dengan kebutuhan UMKM; (3) Peningkatan kapasitas SDM lembaga ZIS; (4) Peningkatan koordinasi dan sinergi antarlembaga terkait; (5) Pengembangan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi; (6) Peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah.

ANALISIS KEBIJAKAN

Provinsi Bengkulu memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal dan kapasitas manajemen. Di sisi lain, potensi pengumpulan dana ZIS di Bengkulu juga cukup besar. Oleh karena itu, penyaluran ZIS produktif dapat menjadi solusi strategis untuk memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena penyaluran dana ZIS masih didominasi oleh kegiatan konsumtif.

Beberapa masalah kebijakan yang perlu diatasi antara lain: (1) Belum adanya strategi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatur dan mengoptimalkan penyaluran ZIS produktif bagi UMKM; (2) Kurangnya koordinasi antarlembaga terkait, seperti lembaga pengelola ZIS, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan; (3) Belum optimalnya sistem informasi dan teknologi untuk mendukung pengelolaan dan penyaluran ZIS; (4) Kurangnya pemahaman ma-

sarakat dan pelaku UMKM mengenai ZIS produktif.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan formulasi dan implementasi kebijakan yang efektif. Kebijakan tersebut harus mencakup berbagai aspek, antara lain: (1) Peningkatan pengumpulan dana ZIS melalui sosialisasi dan edukasi; (2) Penyaluran dana ZIS yang tepat sasaran berdasarkan kebutuhan UMKM; (3) Pendampingan dan pelatihan bagi UMKM yang menerima dana ZIS; (4) Pengawasan dan evaluasi program penyaluran ZIS secara berkala; (5) Sinergi antara lembaga ZIS, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan lainnya.

Evaluasi dan monitoring implementasi kebijakan penyaluran ZIS produktif perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif dan efisien, serta memberikan dampak yang positif bagi pemberdayaan UMKM. Evaluasi dan monitoring ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti laporan dari lembaga ZIS, survei terhadap pelaku UMKM, serta wawancara dengan para pemangku kepentingan. Hasil evaluasi dan monitoring ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa depan.

Partisipasi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan penyaluran ZIS produktif sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti forum diskusi, konsultasi publik, atau survei. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan, diharap-

kan kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kebijakan penyaluran ZIS produktif perlu disinkronkan dengan program-program lain yang terkait dengan pemberdayaan UMKM, seperti program pelatihan, pendampingan, atau akses pembiayaan. Sinkronisasi ini penting untuk menciptakan sinergi dan efisiensi dalam upaya pemberdayaan UMKM. Selain itu, kebijakan ZIS produktif juga perlu diselaraskan dengan kebijakan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan, agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis kebijakan yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi kebijakan yang diajukan antara lain: (1) Pemerintah daerah perlu menyusun strategi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatur dan mengoptimalkan penyaluran ZIS produktif bagi UMKM; (2) Perlu dibentuk forum atau kelompok kerja yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan dan penyaluran ZIS; (3) Pengembangan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan dan penyaluran ZIS perlu menjadi prioritas; (4) Sosialisasi dan edukasi mengenai ZIS produktif kepada masyarakat dan pelaku UMKM perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Adapun hasil analisis kebijakan tentang Strategi Kebijakan Penyaluran ZIS Produktif untuk pemberdayaan UMKM di Provinsi Bengkulu berdasarkan teori SWOT sebagai berikut:

1. Kekuatan (*strengths*)

- a. Provinsi Bengkulu memiliki potensi pengumpulan dana ZIS yang

besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Ini merupakan kekuatan potensial yang dapat dimaksimalkan untuk pemberdayaan UMKM.

- b. Di Bengkulu sudah terdapat lembaga-lembaga yang mengelola ZIS. Ini merupakan modal awal yang penting untuk mengembangkan program penyaluran ZIS produktif.
 - c. UMKM di Bengkulu sangat membutuhkan dukungan modal dan peningkatan kapasitas. Ini merupakan pasar potensial bagi program penyaluran ZIS produktif.
 - d. Pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mengembangkan UMKM. Ini merupakan peluang untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan anggaran bagi program ZIS produktif.
2. Kelemahan (*weaknesses*)
- a. Penyaluran dana ZIS masih didominasi oleh kegiatan konsumtif. Ini merupakan kelemahan yang perlu diatasi agar ZIS dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi pemberdayaan UMKM.
 - b. Kapasitas SDM lembaga ZIS dalam mengelola dan menyalurkan ZIS produktif masih terbatas. Ini merupakan kelemahan yang perlu diatasi melalui pelatihan dan pendampingan.
 - c. Koordinasi antarlembaga terkait, seperti lembaga ZIS, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan, masih lemah. Ini merupakan kelemahan yang perlu diperbaiki agar program ZIS produktif dapat berjalan efektif.

- d. Belum ada strategi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatur dan mengoptimalkan penyaluran ZIS produktif. Ini merupakan kelemahan yang perlu segera diatasi.
3. Peluang (*opportunities*)
 - a. Kesadaran masyarakat mengenai ZIS semakin meningkat. Ini merupakan peluang untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS.
 - b. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penyaluran ZIS.
 - c. Program ZIS produktif dapat disinergikan dengan program-program lain yang terkait dengan pemberdayaan UMKM.
 - d. Pihak swasta dapat diajak kerja sama untuk mendukung program ZIS produktif melalui program CSR.
 4. Ancaman (*threats*)
 - a. Perubahan regulasi terkait ZIS dapat mempengaruhi implementasi program.
 - b. Krisis ekonomi dapat menurunkan kemampuan masyarakat untuk berdonasi ZIS.
 - c. Persaingan antarlembaga ZIS dapat menghambat efektivitas program.
 - d. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ZIS dapat menurunkan pengumpulan dana ZIS.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, dapat disimpulkan bahwa program penyaluran ZIS produktif untuk pemberdayaan UMKM di Provinsi Bengkulu memiliki potensi besar untuk berhasil. Namun, beberapa kelemah-

an perlu diatasi dan peluang perlu dimanfaatkan agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis kebijakan di atas, maka berikut ini ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan penyaluran ZIS produktif untuk pemberdayaan UMKM di Provinsi Bengkulu:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan ZIS
 - Mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola lembaga ZIS dalam bidang pengelolaan keuangan, analisis kelayakan usaha, dan pendampingan UMKM.
 - Mengembangkan sistem informasi manajemen yang modern dan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan ZIS, mulai dari pengumpulan, penyaluran, hingga monitoring dan evaluasi.
 - Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) dalam pengelolaan ZIS, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat
 - Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai ZIS produktif kepada masyarakat melalui berbagai saluran, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas.
 - Mengadakan kampanye publik yang menarik dan efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam ZIS produktif.
 - Memberikan insentif bagi *muzakki*

- (pemberi zakat) yang berdonasi untuk program ZIS produktif, misalnya dalam bentuk pengurangan pajak atau penghargaan.
3. Pengembangan model penyaluran ZIS produktif
 - Memberikan pendampingan kepada UMKM dalam berbagai aspek, seperti manajemen usaha, pemasaran, produksi, dan keuangan.
 - Mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka.
 - Memfasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaan, baik dari lembaga keuangan maupun dari dana ZIS produktif.
 - Memfasilitasi kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar atau investor.
 4. Sinergi dan koordinasi
 - Membentuk forum koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti lembaga ZIS, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat.
 - Mengembangkan kerja sama pro-
 - gram antara lembaga ZIS dengan pemerintah daerah atau lembaga lainnya yang memiliki program pemberdayaan UMKM.
 - Mengintegrasikan data UMKM dan data ZIS untuk memudahkan identifikasi dan penyaluran dana ZIS produktif.
 5. Kebijakan pendukung
 - Menyusun regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai penyaluran ZIS produktif, termasuk mekanisme pengawasan dan evaluasi.
 - Memberikan insentif fiskal bagi UMKM yang menerima dana ZIS produktif, misalnya dalam bentuk pengurangan pajak atau kemudahan perizinan.
 - Menyediakan dukungan infrastruktur yang memadai bagi UMKM, seperti akses internet, transportasi, dan fasilitas produksi.
- Berdasarkan pendekatan teori William N. Dunn, dari alternatif kebijakan yang telah diusulkan di atas dapat dilihat masing-masing skornya sebagai berikut:

Tabel 1. Skoring alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Kriteria Alternatif Kebijakan (1-5)					Total Skor
		Efektivitas	Efisiensi	Keadilan	Responsivitas	Kelayakan Politik	
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan ZIS	4	3	4	3	4	18
2	Peningkatan Kesadaran Masyarakat	3	4	4	4	3	18
3	Pengembangan Model Penyaluran ZIS Produktif	5	3	5	4	4	21
4	Peningkatan Koordinasi dan Sinergi	4	4	4	4	4	20
5	Peningkatan Akses UMKM terhadap Pembiayaan	4	3	5	3	3	18
6	Peningkatan Kapasitas UMKM	5	2	5	4	4	20
7	Pengembangan Pasar dan Pemasaran	4	3	4	4	4	19
8	Penguatan Regulasi dan Kebijakan	3	3	3	3	3	15
9	Monitoring dan Evaluasi	3	4	3	4	3	17
10	Peran Serta Masyarakat	3	4	4	4	3	18

Berdasarkan tabel skoring di atas, dapat dilihat bahwa alternatif kebijakan pengembangan model penyaluran ZIS produktif memiliki total skor tertinggi (21), diikuti oleh peningkatan koordinasi dan sinergi dan peningkatan kapasitas UMKM (masing-masing 20). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga alternatif kebijakan ini memiliki potensi paling besar untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Alternatif kebijakan lain seperti peningkatan kapasitas kelembagaan ZIS, peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan, dan peran serta masyarakat juga memiliki skor yang cukup tinggi (18), namun perlu dioptimalkan lebih lanjut agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan.

Alternatif kebijakan penguatan regulasi dan kebijakan memiliki skor terendah (15). Hal ini menunjukkan bahwa alternatif kebijakan ini perlu dikaji lebih lanjut dan mungkin memerlukan dukungan dari alternatif kebijakan lainnya agar dapat efektif.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis kebijakan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait strategi kebijakan penyaluran ZIS produktif untuk pemberdayaan UMKM di Provinsi Bengkulu, antara lain:

1. Penyaluran ZIS produktif memiliki potensi besar untuk memberdayakan UMKM di Provinsi Bengkulu, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya kesadaran ma-

syarakat, keterbatasan kapasitas lembaga ZIS, dan belum adanya strategi kebijakan yang komprehensif.

2. Dibutuhkan strategi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatur dan mengoptimalkan penyaluran ZIS produktif bagi UMKM. Strategi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan pengumpulan dana ZIS, penyaluran dana ZIS yang tepat sasaran, pendampingan dan pelatihan bagi UMKM, hingga pengawasan dan evaluasi program penyaluran ZIS.
3. Koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait, seperti lembaga pengelola ZIS, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat, sangat penting untuk mendukung keberhasilan program penyaluran ZIS produktif.
4. Peran serta masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan penyaluran ZIS produktif sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
5. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengukur efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa depan.

Dengan implementasi strategi kebijakan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, penyaluran ZIS produktif dapat menjadi solusi strategis untuk memberdayakan UMKM di Provinsi Bengkulu, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan dan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu membuat Surat Edaran tentang Pengembangan Model Penyaluran ZIS Produktif

sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti: pemberian modal usaha, pelatihan, pendampingan, bantuan peralatan, atau kemitraan usaha. Regulasi ini harus mempertimbangkan karakteristik UMKM di Bengkulu, seperti jenis usaha, skala usaha, dan kebutuhan spesifik.

REFERENSI

- Ahmadi, H. (2021). "Peran LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah) dalam Memberikan Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Sragen Tahun 2021". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Tarbiyah Uni-versitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- BAZNAS Bengkulu. (2023). *Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Bengkulu*. BAZNAS Provinsi Bengkulu. <https://bengkulu.baznas.go.id/>
- Indraswanti, B. I. E., & Sunoto. (2024). "Strategi Pengembangan UMKM Kota Bengkulu di Era Ekonomi Digital". *Convergence: The Journal of Economic Development*, 6(1), 50–69. <https://doi.org/10.33369/convergencejep.v6i1.35227>
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). "Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia". *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>
- Putriana, R., Wahyuni, E. S., & Afrianty, N. (2023). "Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Pada Mustahiq Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Bengkulu)". *Jurnal Baabu al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 123–131. <https://doi.org/10.29300/ba.v8i2.5014>
- Rohmawati, L., & Masruchin. (2024). "Optimalisasi Pendistribusian ZIS Melalui Program Pemberdayaan UMKM di Lazismu Sidoarjo dalam Perspektif Maqashid Syariah". *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 249–262. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(1\).16228](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(1).16228)
- Utama, I., & Bahri, E. S. (2021). "Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu". *Jurnal Baabu al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 120–130. <https://doi.org/10.29300/ba.v6i2.2805>
- Widodo, S., Puspitasari, A. D., & Handono, W. D. (2024). "Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Mendorong Inovasi Produk dan Kinerja UMKM". *Eqien Journal of Economics and Business*, 13(2), 186–194. <https://doi.org/10.34308/eqien.v13i02.1754>

